



Anatomi dan Literasi Post-Truth

Muhammad Naziful Haq

Prodi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 13/8/2022

Revised : 7/12/2022

Published : 26/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 99-114

Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Istilah post-truth telah menjadi jargon di banyak pembicaraan dan pembahasan. Konsep teoritisnya kompleks dan menjadi tantangan tersendiri untuk membujukannya di masyarakat umum. Post-truth merupakan konsep yang lebih luas sekaligus lebih cair dibanding hoaks, sehingga post-truth lebih sulit untuk dideteksi, diidentifikasi dan ditangani dibanding hoaks. Namun, arus literasi digital yang tersedia cenderung lebih terkonsentrasi pada bentuk literasi yang hitam-putih. Sementara itu, post-truth cenderung berada di area abu-abu antara fakta dan bukan fakta, cara kerjanya menggunakan eksploitasi prejudis seseorang berdasarkan ideologi, logika kelompok, klaim moral, dan aspek-aspek lain di luar fakta ataupun non-fakta. Proses literasi memang perlu bertahap menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, penting untuk menyempurnakan model literasi kita pada pendekatan yang mampu memitigasi modus operandi post-truth. Tulisan dibagi menjadi dua bagian utama, yakni peta anatomi dan literasi post-truth. Pembahasannya dibagi menjadi empat sub. Pertama, klasifikasi kebenaran; kedua, dimensi post-truth; modus manipulasi post-truth; dan model literasi post-truth. Tulisan ini menyimpulkan bahwa, post-truth dapat ditangani, setidaknya diminimalisir, bila individu telah memiliki sensitivitas terhadap penyalahgunaan bahasa, kedisiplinan dalam logika ilmiah, sensitivitas dalam mengenali pengaruh ekologi media, peka terhadap bias ideologis yang dimilikinya, dan punya ketelitian melakukan penafsiran.

Kata Kunci : Post-Truth; Media Sosial; Digital.

ABSTRACT

Post-truth has become a jargon in conversation and discussion. The concept of the theory is complex and becomes a challenge in itself to ground it in the general public. Post-truth is a broader concept as well as more fluid than hoaxes, so post-truth is more difficult to detect, identify and handle than hoaxes. However, the current available digital literacy tends to be more in the form of black-and-white literacy, which works by exploiting one's prejudices based on ideology, group logic, moral claims, and other aspects beyond facts or non-facts. The literacy process needs to be gradually adjusted to the needs of the community. However, it is important to refine our literacy model in an approach that is able to mitigate the post-truth modus operandi. For this purpose, this paper will be divided into two main parts, namely anatomical maps and post-truth literacy. The discussion will be sub four four. First, classify the truth; second, the post-truth dimension; post-truth manipulation mode; and the post-truth literacy model. This paper concludes that post-truth can be handled, or at least minimized, if the individual has sensitivity to language, discipline in scientific logic, sensitivity in recognizing the ecological influence of media, sensitive to biased ideology, and has accuracy in carrying out his duties.

Keywords : Post-Truth; Sosial Media; Digital.

© 2022 Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Digital Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author : *muhammadnazifulhaq@gmail.com

Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar

DOI : <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v2i2.1359>

A. Pendahuluan

Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019 adalah gerbang transisi digital politik di Indonesia. Situasi ini menandakan telah menyusulnya Indonesia pada peristiwa-peristiwa serupa seperti Pilpres Amerika dan Brexit di tahun 2016, di mana misformasi, propaganda komputasi (Woolley and Howard 2019), intervensi perusahaan teknologi berserta industri jasa kampanye politik (Rakhmani and Saraswati 2021) tidak hanya mendistorsi wacana komunikasi, tetapi juga membelah publik (Lim, 2017).

Tingginya intensitas hoaks, sentimen tribalistik, dan polarisasi yang ada pada periode itu kemudian mendorong berbagai kalangan, khususnya institusi pendidikan dan komunitas masyarakat, menginisiasi berbagai gerakan literasi untuk mereduksi persebaran ataupun dampak yang ditimbulkannya. Sayangnya, upaya yang dilakukan masih sporadis (Kurnia & Astuti, 2017), dan tidak sepadan dengan faktor-faktor penopang post-truth yang lebih terorganisir.

Istilah 'post-truth' adalah konsep yang masih diperdebatkan. Kemunculan teknologi digital telah menarik banyak pihak seperti jurnalis (Ball 2017), sosiolog (Fuller, 2018), filsuf (McIntyre, 2018), pakar media (Hannan, 2018), hingga ilmuwan politik (Baron 2018) untuk merasa punya kepentingan memberikan klarifikasi konseptual pada perdebatan yang ada karena terusik oleh disrupsi digital beserta implikasi politik yang ditimbulkannya.

Sekalipun banyak pengertian yang ditawarkan dari berbagai sudut pandang, namun definisi post-truth yang paling banyak dirujuk (Ball 2017) adalah definisi milik Oxford English Dictionary, yakni "kondisi di mana fakta objektif kalah berpengaruh dibanding opini dan emosi" (OED, 2016). Pengertian milik OED inilah yang kemudian menentukan seorang ilmuwan menyortir konten (data) penelitiannya, membela pihak yang punya komitmen terhadap kebenaran, dan pada derajat tertentu dapat mendiskreditkan pihak lain yang teridentifikasi 'komitmen terhadap opini dan emosi'.

Artefak-arte-fak seperti berita bohong, hoaks, ucapan yang dipelintir, sering kali ditautkan pada payung besar bernama post-truth ((McComiskey 2017), 2017; Haq, 2019; McIntyre, 2018). Pada skema yang lebih besar, sebagian pengamat memandang bahwa post-truth ditimbulkan oleh gelembung informasi (filter bubble) yang dicipta oleh algoritma media sosial, yang kemudian menyebarkan artefak-arte-fak tersebut pada distribusi yang terpersonifikasi (Barzilai and Chinn 2020). Pengertian post-truth yang ditawarkan OED pun sepertinya cukup memadai untuk mengelaborasi medan komunikasi yang sedemikian kompleks, dan menopang literasi publik tentang bahaya emosi, pelintiran, dan kebohongan.

Kritik kemudian muncul dari Steve Fuller, bahwa definisi yang ditawarkan OED mengandung bias kekuasaan (Steve Fuller, 2018). Fuller memandang, dikotomi fakta dan emosi membuka ruang legitimasi bagi seseorang untuk mendiskreditkan orang ataupun kelompok lain yang tidak berpihak pada "kebenaran" ataupun "fakta".

Berbeda dengan OED, Bagi Fuller, post-truth adalah permainan "rezim" pengetahuan yang berkuasa (Fuller, 2018). Dengan mengikuti Vilfredo Pareto, dikotomi post-truth menurut Fuller adalah bukan tentang mana fakta dan mana emosi, melainkan tentang mana kebenaran resmi dan kebenaran tidak resmi (Fuller, 2018).

Dalam konteks masyarakat abad 21, dikotomi Fullerialan direpresentasikan oleh keterbelahan antara kebenaran saintifik, kebenaran pemerintah, kebenaran sosio-kultural di satu pihak, dan kebenaran partisan, kebenaran konspiratif, dan sejenisnya di lain pihak. Dalam pandangan Fuller, dikotomi fakta dan emosi ala OED dapat berimplikasi pada munculnya karakter masyarakat yang berhenti mendengarkan lawan bicaranya sekalipun berasal dari iklim kognitif yang berseberangan (Steve Fuller, 2018).

Oleh karena itu, Fuller kemudian meninjau ulang pengertian post-truth agar konsep yang didesain tidak melahirkan produk penelitian yang punya potensi untuk melegitimasi diskriminasi. Di lain sisi, memaksakan pemeluk kebenaran alternatif untuk mempercayai kebenaran resmi juga tidak membuahkan apa-apa selain semakin menguatnya kepercayaan personal tersebut (Lewandowsky et al., 2017).

Polemik yang telah dipaparkan kemudian memunculkan dilema antara konsep post-truth milik OED dan milik Fuller. Pada satu sisi, pengertian post-truth ala OED memang telah berkontribusi banyak dalam membasmi klaim-klaim tidak bertanggung-jawab yang membahayakan proses demokrasi dan proses

pengambilan kebijakan. Tetapi di lain sisi, pengertian post-truth ala OED juga membuka peluang bagi praktik diskriminasi dan mengarahkan masyarakat berhenti mendengarkan kelompok liyan.

Di lain pihak, konsep tawarannya Fuller memang menjanjikan untuk membuka dialog masyarakat lebih terbuka dan gagasan tentang kebenaran tidak termonopoli. Tetapi, konsep post-truth milik Fuller sulit diturunkan untuk menjadi mekanisme-praktis dalam melindungi proses demokrasi dan proses pengambilan kebijakan dari klaim-klaim alternatif.

Dilema tersebut menunjukkan bahwa ada kompleksitas yang belum terurai dari konsep post-truth itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena watak dan praktik post-truth yang multi-dimensi, sehingga setiap aras analisis punya perumusan epistemologinya masing-masing. Tetapi, di lain sisi, hal tersebut juga menunjukkan bahwa manipulasi post-truth dapat dilakukan dari banyak dimensi, misalnya seperti dimensi bahasa (Bruce McComiskey, 2017), epistemologi kebenaran (Hardiman, 2018), tekstualitas media sosial (Hew, 2018; (Kalpokas n.d.); Haq, 2021), rezim politik (Adam 2006), politik pengetahuan (Ananta 2006) dan bias algoritma media sosial (Gorwa et al., 2020; Krasmann, 2020; Lim, 2017).

Patologi sosial yang terjadi, seperti pembelahan masyarakat (enclave), kebencian, fanatisme partisan, dan korosi terhadap sains, dengan kata lain, merupakan fenomena permukaan yang menyimpan faktor berlapis di dalamnya. Sayangnya, kecenderungan dalam merespon tantangan itu masih mengarah pada semangat fungsionalis ala Developmentalisme Orde Baru dan masih menyimpan paradoks.

Semangat fungsionalis melihat bahwa, jika ada ketidak-idealan kenyataan akibat mis-match antara kualitas manusia dan struktur sosial, maka yang diubah adalah manusianya ((Budiman 1986); Hadiz & Dhakidae, 2006). Dalam Materi Pendukung Literasi Digital tahun 2017 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya, melukiskan bahwa semakin warga negara melek literasi digital maka semakin kondusif untuk mewujudkan agenda technopreneurship (Kemendikbud, 2017).

Dengan adanya semangat fungsionalis, literasi digital di Indonesia lebih dimaknai sebagai kecakapan produktif-teknis seperti copywriting, video-editing, digital-marketing dan lain sejenisnya (Kominfo, 2021), dibanding pemaknaan kritis-filosofis seperti critical thinking, literasi politik bahasa, literasi ideologi, dan literasi logika algoritma media sosial (Pangrazio, 2016). Upaya untuk menanggulangi information-hazard memang telah digalakkan, tetapi masih terbatas pada fact-check yang bersifat hitam putih dan belum cukup menghimpun luasnya keabu-abuan praktik post-truth.

Sementara itu, paradoks muncul ketika, pada satu sisi, agenda literasi digital banyak diinisiasi komunitas masyarakat, institusi pendidikan dan pengambil kebijakan, tetapi di lain sisi, penggunaan bot, pendengung dan influencer masih diminati elit politik (Haq, 2021), dan di saat yang sama juga terjadi konsolidasi antara elit ekonomi oligarkis dan elit politik dengan penyedia jasa kampanye digital (Rakhmani and Saraswati 2021).

Jadi, secara garis besar, ada ambiguitas sikap dalam menghadapi tantangan digital. Satu sisi ada cita-cita melawan post-truth dan keinginan untuk menciptakan warga negara yang melek digital, tetapi di lain sisi, kondisi lingkungan dan praktik-praktik post-truth ada yang ingin memelihara. Langkah ideal dalam menangani hal ini adalah dengan membuat perubahan struktural sehingga terjadi keseragaman sikap dari berbagai stakeholder, dari mulai sipil, pendidikan, hingga elit politik dan penyedia jasa kampanye, terhadap tantangan digital. Tetapi, langkah ini membutuhkan energi besar dan belum tentu semua stakeholder menyukainya, mengingat telah mengakarnya oligarki politik media di Indonesia (Tapsell, 2017).

Oleh karena itu, artikel argumentatif ini menawarkan langkah minimal yang dapat ditempuh dengan, pertama, melakukan pemetaan anatomi post-truth berdasarkan titik manipulatifnya, dan kedua, mengevaluasi tiap titik manipulatif tersebut dengan model literasi yang sektoral untuk tiap titik manipulatifnya.

Upaya pemetaan post-truth sebenarnya telah dilakukan oleh Barzilai dan Chinn. Mereka juga memberikan serangkain opsi tindakan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan. (Barzilai and Chinn 2020). Tetapi pemetaan mereka hanya berfokus pada faktor, dan tidak menghimpun 'peluang manipulasi'. Upaya serupa juga dilakukan oleh Hyvönen, tetapi Hyvönen mendesain ulang post-truth dalam konstruksi khas ilmu politik yang ia kembangkan dari Hannah Arendt (Hyvönen, 2018). Berbeda dengan Barzilai dan Chinn, Hyvönen tidak memberikan tawaran solusi atas rekonstruksi masalah yang ia uraikan.

Lewandowsky dkk. juga telah menggambar peta anatomi post-truth, namun rekomendasi yang diberikan lebih menitik-beratkan pada aspek teknologi dan psiko-kognisi (Lewandowsky et al., 2017), sehingga kurang memberikan ruang bagi pemodelan literasi yang lebih teknis atas masalah yang dipaparkan. Pemetaan milik Lewandowsky dkk. sebenarnya mirip dengan pemetaan yang dilakukan McIntyre. Bedanya, McIntyre tidak menyertakan ruang pembahasan bagi algoritma dan permainan pengetahuan (McIntyre, 2018).

Peta yang lebih minimalis digambarkan oleh McComiskey dengan membedah post-truth semata soal aspek kebahasaan Aristotelian yang dikombinasikan dengan konsep bullshit milik Frankfurt (McComiskey 2017). Nuansa post-truth yang lebih luas yang sebagaimana disebutkan di banyak riset, luput dari ulasan McComiskey.

Dari sudut pandang pendidikan, post-truth juga pernah dipetakan berdasarkan dimensi kebenaran yang dipercayai oleh guru-guru dengan tingkat kesadaran yang berbeda (koresponden, pragmatis, relativis dan kritis) (Krahenbuhl 2021). Alih-alih dapat diturunkan menjadi rekomendasi, Krahenbuhl menemukan bahwa perbedaan tingkat kesadaran tersebut menimbulkan perbedaan pengertian 'kebenaran' antar guru.

Pemetaan anatomi post-truth bertujuan untuk menunjukkan ranah-ranah manipulatif yang berada di luar dikotomi 'fakta' dan 'emosi' yang umumnya belum tertangani dalam pelatihan fact-checking ataupun semangat 'saring sebelum sharing'. Pembahasan akan dibagi menjadi tiga babak. Pertama, ulasan singkat tentang diversitas kebenaran. Kedua, pemetaan anatomi post-truth beserta contohnya. Dan ketiga, rekomendasi literasi post-truth yang lebih sektoral atas jenis ranah manipulasinya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan *desk-review* sebagai penopang utama. Sumber-sumber data dan analisis akan dihimpun dari berbagai literatur, website, hasil survei, dan lain-lain.

C. Hasil dan Pembahasan

Kebenaran di Era Digital

Kebenaran adalah ide yang telah diperdebatkan selama ribuan tahun. Absennya kebenaran dalam kehidupan manusia (human affairs) memiliki implikasi yang beragam, dari mulai putusnya kepercayaan sosial (Illing, 2017), hilangnya nyawa (Boseley n.d.), hingga runtuhnya sebuah rezim (Latif; Subandi, 1995). Oleh karena itu, kebenaran merupakan pengikat antara satu elemen sosial dan elemen lainnya agar dapat berjalan sesuai dengan sistem yang berlaku (order) untuk menggapai tujuan tertentu, baik itu kepercayaan komunal, keberlangsungan hidup, ataupun stabilitas politik.

Sulit untuk menguraikan konsep kebenaran secara akurat dan clear-cut, karena banyaknya irisan dan tumpang tindih dalam kenyataan praktiknya, di samping konsep kebenaran juga masih menjadi perdebatan lanjutan dikalangan ilmuwan dan filsuf. Tetapi, minimalnya ada enam jenis kebenaran yang berperan penting dalam konteks kehidupan di Indonesia. Pembahasan ini menyadari bahwa konsep kebenaran terlalu luas untuk diuraikan sepenuhnya. Tetapi, untuk tujuan efisiensi pembahasan, setidaknya ada enam jenis kebenaran yang dapat digeneralisasi.

Pertama, kebenaran korespondensi (correspondent theory of truth), yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap benar bila selaras dengan kenyataan. Kebenaran jenis ini banyak berperan dalam basis kehidupan. Di ranah saintifik dan jurnalistik, kebenaran korespondensi sangat menentukan validitas temuan ataupun pernyataan (Harsono, 2010). Di kehidupan sosial, kebenaran korespondensi menentukan kepercayaan sosial (social trust) yang pada beberapa implikasinya dapat menentukan damai atau tidaknya, dan bersatu atau tidaknya suatu kumpulan komunitas di suatu daerah.

Kedua, kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi pada dasarnya merupakan turunan dari logika metafisik. Dalam kebenaran koherensi, sesuatu dianggap benar bila selaras dengan premis sebelumnya. Kebenaran koherensi tidak hanya penting bagi praktik berbahasa, tetapi juga penting bagi praktik bernalar tentang causa-prima dari sesuatu. Artinya, kebenaran koherensi bersifat logis-matematis. Ia tidak hanya

tentang keselarasan horizontal dalam premis gramatika bahasa, melainkan juga mencakup keselarasan vertikal dalam hubungan sebab-akibat suatu peristiwa.

Ketiga, kebenaran pragmatik. Kebenaran pragmatik memandang bahwa setiap orang memiliki pengalaman kebenarannya masing-masing tentang suatu hal. Kebenaran pragmatik menoleransi partikularitas pra-pemahaman yang terbagun dari serangkaian pengalaman tiap individu. Kebenaran pragmatik bukan berarti sepadan dengan doktrin postmodernisme yang membolehkan, dalam istilahnya Christine Hine, *whatever goes*, hingga taraf dekonstruksi substansi ataupun semantik. Kebenaran pragmatik adalah tentang diversitas pengalaman empirik atas suatu hal.

Keempat, kebenaran saintifik. Walaupun banyak dijalankan oleh kebenaran korespondensi, tetapi kebenaran saintifik punya khasnya sendiri. Kebenaran saintifik dapat dibagi menjadi dua alam: alam natural (natural science) dan alam sosial (social science). Keduanya sama-sama bertumpu pada materi, baik itu berbentuk fisik ataupun konseptual. Prinsip yang menghidupnya adalah testability dan falsifikasi. Artinya, sesuatu terbuka untuk diuji dan digugurkan. Dalam keterbukaan tersebut, sikap utama kebenaran ilmiah terletak pada kerelaannya atas koreksi yang mungkin terjadi (McIntyre, 2018). Tetapi, hal ini menyiratkan, bahwa kebenaran saintifik adalah bukan satu-satunya lokus yang menyediakan kebenaran mutlak, melainkan lokus terdekat yang dengan kebenaran, karena sains tidak pernah mencapai kebenaran mutlak, melainkan selalu menuju kebenaran.

Kelima, kebenaran agama. Berbeda dengan kebenaran saintifik yang bertumpu pada alam materi fisik dan konseptual, dimensi kebenaran agama mencakup ranah transenden dan imanen. Kebenaran agama setidaknya dapat dibagi menjadi dua persoalan: persoalan tafsir dan persoalan otoritas. Persoalan tafsir merupakan perbedaan klaim kebenaran berdasarkan metode, tujuan dan rangkaian tafsir suatu teks suci (Syamsuddin, 2017). Sementara itu, persoalan otoritas merupakan perdebatan tentang kekuasaan antara kausa materil dan kausa imanen atas kehidupan (Jati, 2017). Pada beberapa kesempatan, memercayai hal yang tidak terlihat dapat digolongkan sebagai tindakan beriman (McDermott, 2019), walaupun yang diyakininya adalah hasil fabrikasi atau bertentangan dengan salah satu dari beberapa jenis kebenaran lainnya.

Keenam, kebenaran norma. Kebenaran norma merupakan tata dan protokol laku seseorang terhadap komunitasnya. Suatu pesan yang korespon, koheren, sekaligus saintifik dapat dieliminasi oleh kebenaran pragmatik bila cara menyampaikannya tidak sesuai dengan tata dan protokol yang berlaku dalam kebudayaan ataupun ideologi suatu komunitas.

Peran enam kebenaran tersebut saling kelindan dalam berbagai lini kehidupan, baik itu bahasa, praktik wacana, praktik ilmiah, agama dan moral. Masalah utama dalam dunia post-truth adalah bukan tidak adanya kebenaran, atau semua jenis kebenaran itu tereliminasi, atau kebenaran menjadi relatif, dan juga bukan kebenaran mengalami gerhana. Pada derajat tertentu, postulat-postulat itu benar tetapi kurang universal secara konteks, sehingga pembelaan terhadap jenis kebenaran tertentu dapat beriringan dengan negasi terhadap jenis kebenaran yang lain.

Misalnya, penegasan terhadap peran kebenaran ilmiah yang digagas McIntyre (2018) dan Harari (2019) adalah berasal dari kekhawatiran kaum intelektual atas peran konservatisme agama dalam menyebar atau mempersubur post-truth. Serupa dengan McIntyre dan Harari namun dengan posisi yang berbeda, Fuller (Fuller, 2018) juga sama-sama memiliki minat terhadap penguatan kebenaran ilmiah, tetapi konsern utama Fuller terletak pada permainan pengetahuan yang lebih membuka peluang tukar posisi dominan antara kebenaran ilmiah dan kebenaran norma. Meskipun demikian, aspek yang lebih kecil seperti praktik kebahasaan, tidak mendapat penjelasan dalam argumennya Fuller. Pada lain sisi, fokus kebahasaan, sebagaimana yang diulas oleh McComiskey, cenderung menekankan bahwa post-truth lebih merupakan *vita active* yang dilakukan oleh seseorang. Pengaruh ekologi media dan benturan antar lokus pengetahuan gagal terjelaskan (McComiskey, 2017). Dengan kata lain, ulasan tentang post-truth cenderung sektoral dan tidak terintegrasi dengan elemen-elemen lain yang ada di luarnya.

Oleh karena itu, Masalah utama dalam dunia post-truth lebih merupakan tentang munculnya konteks-konteks informasi yang mendorong terjadinya gesekan dan entropi antar standar dan lapisan kebenaran, baik

itu standar koherensi, korespondensi dan pragmatik, ataupun dimensi saintifik, normal, psikologis, dan agama. Tiga faktor yang memengaruhinya, yakni: faktor sosiologis, psikologis, dan politik.

Secara sosiologis, sifat telepresen dari komunikasi digital merangsang sikap kurang atau bahkan tidak bertanggungjawab atas pesan yang disampaikan ataupun pemaknaan yang diyakini ((Floridi 2014); Twenge, 2017). Secara psikologis, sifat multimedia dari komunikasi digital memantik pendalaman emosi atas informasi yang diterima ataupun yang disampaikan seseorang (Hew, 2018b; Postman, 1988). Secara politik, distorsi informasi dipraktikkan baik itu dengan pesan yang kontroversial ataupun dengan distribusi yang terpersonifikasi sekaligus masif ((Kreiss & Mcgregor, 2018); (Ward 2018); (Zuboff 2019)). Tiga faktor tersebut membuka konteks interaksi yang memungkinkan bagi tiap individu untuk membenturkan struktur kognisinya dengan struktur kognisi orang lain.

Faktor-faktor tersebut memiliki dimensi yang berlapis, dibanding pengertian post-truth milik OED yang lebih bersifat human-centrist, dan akan menimbulkan reduksi konseptual jika disederhanakan dengan dikotomi hoaks-fakta. Melalui benturan antar kognisi yang ditimbulkan faktor-faktor tersebut, post-truth mengukuhkan watak keabu-abuannya sehingga sulit untuk diurai dengan satu definisi ataupun kategorisasi tunggal.

Anatomi Post-Truth

Keabu-abuan post-truth minimalnya dapat dikategorisasi dalam tiga spektrum dimensi (Tabel 1), yakni: dimensi pesan, dimensi pengetahuan, dan dimensi ekologi. Dimensi-dimensi tersebut punya peran sama signifikan dalam penciptaan katastrofi informasi dalam suatu masyarakat.

Dimensi pesan tersusun dari aspek tekstual dan aspek retorik. Aspek tekstual lebih merupakan masalah semantik-hermeneutis yang berkuat pada komposisi, bentuk, pemaknaan, susunan/rangkaian dan makna serta tujuan (intention) sebuah pesan (Bruce McComiskey, 2017; Gracia, 1995; Turnbull, 2017). Misalnya, ada dua koran yang memiliki headline berita yang sama “Pendidikan Mendapat Kucuran Dana 1T”, tapi memiliki gambar yang berbeda. koran pertama menampilkan foto siswa SD di Indonesia bagian Timur dengan jalan tanah dan ruang kelas sederhana. Sedangkan koran kedua menampilkan foto siswa-siswi yang sedang kerja kelompok di halaman sekolah taraf internasional, lengkap dengan latar gedung bertingkat dan kebersihan yang memadai. Informasi yang sama dengan dua gambar yang berbeda akan memiliki makna yang berbeda. Headline koran pertama lebih bermakna ‘pembangunan’, sedangkan koran kedua lebih dimaknai sebagai ‘kemajuan dan ambisi’.

Neil Postman (1988), menyebutnya sebagai pseudo-context, di mana gambar menciptakan konteks palsu bagi pemaknaan sebuah informasi. Walaupun contoh tersebut terkesan netral tetapi berita tersebut dapat menjadi katalis bagi perasaan ataupun sikap tertentu yang dianut oleh seseorang ataupun sekelompok audiens dengan perbedaan pengalaman dan susunan/rangkaian informasi. Pada titik ini, informasi netral, professional, dan kredibel sekalipun dapat berkontribusi pada kondisi post-truth karena ada resonansi personal dengan diri individu ataupun kelompok ((Rodriguez et al., 2017); (McComiskey 2017)). Kasus-kasus lain dengan kompleksitas yang lebih bernuansa dapat ditemui di berbagai media sosial dengan logika tekstualnya masing-masing.

Sementara itu, aspek retorik lebih merupakan soal praktik berbahasa. Pesan yang dirakit oleh seorang komunikator mendapat pengaruh dari struktur logika komposisinya (logos), tampilan (pathos) dan kredibilitas (ethos) si komunikator (McComiskey, 2017). Berbeda dengan headline berita yang mendapat referensi makna dari sebuah gambar, pesan yang disampaikan dari praktik retorik mendapat referensi makna dari pathos dan ethos komunikatornya. Di dunia pra-post-truth, retorik dinilai berdasarkan koherensi, korespondensi dan kekokohan basis argumennya (logos). Di dunia post-truth, pathos dan ethos lebih utama dibanding logos (McComiskey, 2017). Dalam tradisi retorik, post-truth dipandang sebagai kondisi ketika bahasa tercerabut dari realita (McComiskey, 2017).

Dengan dominannya pathos dan ethos dalam praktik berbahasa, manipulasi dapat dilakukan melalui penciptaan kredibilitas palsu dan pemupukan kepercayaan mendalam. Hal ini terwakili oleh pengakuan Felix Siauw sebagai pelaku propagasi visual-ideologis (Hew, 2018a), “Meskipun pengetahuan saya tentang Islam

kurang mendalam dibanding penceramah lain, tapi banyak muslim yang lebih tertarik mendengarkan saya dibanding mereka karena saya seorang muallaf chinese yang aktif di HTI ... untuk menarik kaum muda, media sosial adalah medium yang penting ... kita harus membuat dakwah menarik ... kita harus mengemas ide kita dengan cantik.” (Hew, 2018a). Pengakuan tersebut koheren dengan kontroversi soal kepakaran Felix Siauw oleh agamawan sejawat. Hew Wei Wang menyebut, Felix Siauw adalah representasi dari kombinasi pendakwah media sosial, aktivis politik yang gigih, dan sekaligus entrepreneur religius sukses (Hew, 2018a).

Berbeda dengan dimensi pesan, dimensi pengetahuan merupakan ranah ‘meta’, yang masing-masing subjek memiliki serangkaian nilai-nilai khasnya masing-masing sebagai prinsip logika kerja. Dalam konteks masyarakat manapun, satu lokus pengetahuan dengan lokus pengetahuan lainnya dapat sedikit banyak berbenturan. Misalnya, dalam konteks masyarakat Islam Indonesia, hubungan antara penciptaan Adam dan teori evolusi terbelah menjadi dua pendapat. Pendapat agama dan pendapat Darwinian. Keduanya tidak menjadi diskursus yang gamblang tampil didepan panggung karena adanya resiko mendorong doktrin agama bergesekan dengan nalar sains tentang testability dan falsifikasi yang dianggap kurang etis dari sudut pandang religius.

Skema gesekan berbeda-beda antar satu lokus pengetahuan dan lokus pengetahuan lainnya. Isu sosial-politik seperti isu pemimpin non-muslim misalnya, walaupun ilmu sosial membolehkannya atas nama humanisme, demokrasi dan ketakterhubungan faktor kepercayaan dan ranah public, tetapi belum tentu dibolehkan oleh lokus agama karena perbedaan epistemologi yang ditarik dari varian tafsir teks, cita-cita komunal dan lain-lain (Tabel 2).

Peluang benturan juga dapat terjadi di luar skema kontras antara sains dan agama, seperti misalnya dalam skema antara sains dan nasionalisme, seperti yang terjadi di kasus Marc Lipsitch dan pemerintah Indonesia (Cahya 2020). Ketika beberapa negara mulai kemasukan Covid-19, Lipsitch melakukan riset dan menunjukkan bahwa dengan keterbukaan mobilitas penduduk di Indonesia di tengah situasi global terdisrupsi oleh Covid-19, boleh jadi Covid-19 sebenarnya telah ada di Indonesia dan tak terprediksi oleh pemerintah. Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, merespon, bahwa hasil temuan riset Lipsitch telah merendahkan bangsa Indonesia. Respon Terawan kemudian disusul oleh kelakar beberapa pejabat tingkat tinggi, dari mulai klaim bahwa orang Indonesia kebal Covid-19 karena nasi kucing, hingga karena selalu membaca doa.

Nasionalisme Indonesia pada mulanya tumbuh dari semangat antagonisme liyan (Shils, 1983). Seiring dengan bergulirnya sejarah, totalitarianisme Orde Baru, semangat antagonisasi liyan berubah, yang mulanya di era pra-kemerdekaan hingga era kemerdekaan diarahkan pada koloni asing (Shils, 1983), menjadi kepada ideologi selain nasionalisme, seperti komunisme (Farid 2006) atau Islamisme (Hasbullah, 2012). Di saat yang sama, totalitarianisme Orde Baru juga merangsang nasionalisme bermutasi menjadi watak revisionis terhadap sejarah bangsa dan kenyataan hidup, dari mulai rekonstruksi sejarah yang telah ditentukan oleh rezim (Adam 2006), hingga penggunaan kata-kata optimistik di tengah situasi krisis walaupun tidak diimbangi dengan tindakan yang memadai (Latif & Ibrahim, 1996; Zein, 2020).

Dalam kasus Lipsitch, post-truth hadir karena ada dua pilihan kebenaran (kebenaran saintifik dan kebenaran nasional) yang keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama-sama benar dan logis. Masalahnya kemudian terletak pada hak prerogatif seseorang untuk memilih loyal pada salah satu kebenaran tersebut. Kebenaran nasionalisme dalam kasus ini memiliki akar dan desain logika dari sejarah panjang mutasi watak nasionalisme di era Orde Baru.

Denialism menjadi ciri penting dalam kasus Lipsitch dan Terawan. Akarnya terletak pada adanya perbedaan kenyataan dengan basis yang berbeda. Kebenaran saintifik mendasarkan kenyataannya pada proses disiplin ilmiah dan kerja-kerja empiris. Sementara itu, kebenaran nasionalisme mendasarkan kenyataan pada bayangan ideal yang diimajinasikan oleh ideologi.

Lingkungan digital adalah lingkungan hidup yang sepenuhnya berbeda dengan lingkungan analog pra-digital. Dalam dunia analog pra-digital, komunikasi tidak dimoderasi oleh algoritma. Distorsi ataupun pelintiran informasi hanya bisa terjadi jika bukan karena upaya sistematis dari komunikator dan pemegang kuasa media, maka karena playing victim atau pelintiran kebencian oleh komunikan.

Kompleksitas praktik tersebut meningkat ketika memasuki era digital. Bias algoritma dunia digital (Krasmann 2020) setidaknya dapat dipandang dalam dua peran, yakni peran pasif dan peran aktif. Peran pasif merupakan bias yang tercipta dari serangkaian akumulasi perilaku seorang individu di media sosial yang kemudian dipantulkan ulang oleh algoritma dalam bentuk rekomendasi konten ataupun struktur lini masa (timeline) hasil analisa data perilaku individu tersebut. Sehingga, timbul dampak-dampak tertentu, seperti pendalaman emosi, penebalan keyakinan, peruncingan kebencian, fanatisme, dan kepompong informasi (filter bubble). Sementara itu, peran aktif adalah tentang penggunaan algoritma dan data pengguna dengan sengaja dan sistematis oleh aliansi politik dan penyedia jasa teknologi dalam menciptakan bias pengguna dalam skala regional ataupun nasional, dengan penyortiran berdasarkan etnisitas, agama, afiliasi politik ataupun sentimen.

Bias yang tercipta dari peran pasif memiliki karakter yang lebih sektoral dan individual. Pariser menyebutnya sebagai filter bubble. Tetapi, walaupun lebih sektoral dan individual, tidak berarti tanpa ada dampak komunal. Kasus bias algoritma tentang representasi (image) Twitter misalnya. Algoritma Twitter lebih memilih menampilkan bentuk wajah yang tirus, putih, dan muda, dibanding yang sebaliknya (Hern, 2021). Rumman Chowdhury, Kepala Divisi Etika AI Twitter, mengatakan, “ketika kita membicarakan bias dalam desain [Twitter] kita, ini tidak hanya tentang percobaan akademik, melainkan hal itu juga berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat kita berpikir” (Hern, 2021).

Merembesnya cara berpikir masyarakat dalam logika kerja algoritma dapat berbeda ekspresi di satu daerah dengan daerah lainnya. Hal serupa juga dapat terjadi dengan bentuk wacana ataupun meta-struktur lain, seperti agama, budaya politik, ataupun sistem masyarakat. Artinya, akumulasi natural data perilaku pengguna dalam skala makro tidak hanya memahat logika kerja algoritma itu sendiri, melainkan juga punya peluang untuk berbalik memperkuat bias pemikiran yang ada di suatu masyarakat.

Sementara itu, bias yang tercipta dari peran aktif memiliki karakter yang lebih regional dan manipulatif. Algoritma tidak hanya mengkurasi data perilaku pengguna, melainkan mengkurasi berdasarkan tujuan yang telah ditentukan oleh pemilik kepentingan (Gorton, 2016; Groshek & Koc-Michalska, 2017; Murray & Scime, 2010). Algoritma pada dasarnya diciptakan untuk menggapai tujuan tertentu dengan modus operasi seefisien mungkin (Bunz 2014). Masalah muncul ketika tujuan algoritma dari masing-masing The Big Five (Google, Facebook, Twitter, Apple, Amazon) tak terungkap di ranah publik. Kerentanan situasi ini baru terungkap ketika skandal Cambridge Analytica naik ke permukaan wacana publik karena keterlibatannya dalam memengaruhi opini publik di masa polling Brexit. Kasus serupa juga terjadi di Amerika ketika platform aplikasi Gloop, sebuah platform berbasis keagamaan terafiliasi Cambridge Analytica, terbukti melakukan kurasi data jemaat Gereja untuk kepentingan analisis perilaku dan tujuan elektoral Donald Trump (Mudge, 2020).

Dengan kata lain, penciptaan bias aktif melibatkan rekayasa partisipatif dari aktor tertentu dengan membawa serangkaian konfigurasi tertentu yang menentukan tujuan modus efisiensi algoritma sehingga bentuk rekayasa sosial yang dikehendaki bisa terjadi.

Modus Manipulasi Post-Truth

Dimensi-dimensi post-truth dapat saling tumpang tindih dalam praktik yang juga bervariasi. Komposisinya sangat tertuang pada: pertama, kesadaran aktor terhadap kesempatan wacana politik; kedua, kesadaran aktor terhadap kesempatan struktur politik; ketiga, kesadaran aktor terhadap efektivitas dimensi-dimensi tersebut dalam memengaruhi publik. Tiga kesadaran yang disebut lebih awal merupakan ranah sosiologi politik. Sementara ranah yang terakhir disebut adalah lokus inti yang memuat keberagaman modus manipulasi post-truth. Setidaknya ada enam modus manipulasi yang masing-masing memiliki tekniknya sendiri. Enam modus itu ialah: modus korespondensi; modus koherensi; modus pragmatik; modus saintifik; modus agama; dan modus norman atau ideologi.

Tabel 1. Modus Manipulasi Post-Truth (diolah dari berbagai sumber)

MODUS MANIPULASI				
Korespondensi	Fabrikasi fakta	<i>Bullshit</i>	Bohong	
Koherensi	Pembenturan antar premis/fakta general dan partikular	Pembenturan antara dua lokus yang berbeda dalam satu metafora yang sama		
Pragmatik	Demagogi	<i>Gaslighting</i>	Personalisasi Kepercayaan	
Saintifik	<i>Bogus research</i>	<i>Cherrypicking</i>	Salah konteks penggunaan	<i>Scientific fraud</i>
Agama	Tafsir teks	Kontestasi otoritas kuasa kehidupan (kuasa materil vs kuasa imanen)	Etika kelompok	Cita-cita komunal
Norma/ Ideologi	Kategori imperatif (X yang baik adalah X1)	Perasaan keanggotaan individu terhadap suatu kelompok (<i>affect</i>)	Konstruk emosionologi	

Modus ini adalah modus paling dasar dalam praktik post-truth populer di era digital. Apa yang dimaksud oleh post-truth dalam pengertian OED adalah post-truth yang berada pada modus korespondensi. Praktik modus korespondensi merentang dari mulai fabrikasi fakta, bullshit dan bohong. Sekilas, ketiganya memiliki kemiripan, tetapi ketiganya memiliki posisi spektrum yang berbeda. Perbedaan ini lebih disebabkan oleh perbedaan konseptual yang dalam perbendaharaan bahasa Indonesia sulit untuk menemukan padanan kata yang akurat bagi fabrication, bullshit dan lie.

Fabrikasi fakta adalah upaya modifikasi bukti empiris (empirical evidence) untuk menunjang praktik verbal dan diskursif tertentu oleh seseorang. Dalam praktik fabrikasi fakta, asumsi ada lebih dulu dibanding fakta. Dan fakta empiris diciptakan berdasarkan preskripsi yang telah digariskan oleh asumsi atau tujuan tertentu. Misalnya, kasus pembuatan diorama di Monas (Adam 2006). Proyek ini mengalami tiga kali perubahan desain diorama, yakni tahun 1966, 1970 dan 1976. Di antara serangkaian diorama-diorama yang direncanakan, diorama Supersemar, yang diusulkan pada tahun 1976, adalah diorama yang menunjukkan unsur fabrikasi paling menonjol.

Adam (Adam 2006) menulis, “menurut seniman yang membuat diorama itu, terjadi diskusi apakah Soeharto dalam peristiwa digambarkan memakai seragam lengkap tentara atau piyama. Kalau memakai seragam tampaknya kurang masuk akal, karena diberitakan bahwa tanggal 11 Maret 1966 Soeharto tidak menghadiri sidang kabinet gara-gara sakit. Sebaliknya kalau memakai piyama Soeharto akan tampak kurang berwibawa. Pada akhirnya digambarkan Soeharto sedang terbaring di tempat tidur sedangkan tiga orang jenderal duduk di kursi di samping ranjang. Susunan ini dibuat untuk memperlihatkan kepasifan Soeharto bahwa sebetulnya dia tidak berniat apalagi bernafsu untuk mengambil kekuasaan.”

Fabrikasi fakta bukanlah barang baru dalam sejarah umat manusia. Dalam tradisi Kitab Suci, telah ada cerita saudara Yusuf, Bunyamin, yang memodifikasi bukti empiris berupa sobekan baju Yusuf yang dilumuri darah domba. Di era digital, fabrikasi fakta memasuki level baru di mana kerapihan (*seamlessness*), distribusi dan fragmentasinya tak terbayang. Berkaca dari kasus diorama Monas, hal tersulit dalam membongkar fabrikasi fakta, selain bias psikologis individu, adalah diperlukannya kemampuan pengetahuan spesifik tentang isu yang diangkat oleh fabrikasi tertentu.

Fabrikasi fakta jelas suatu kebohongan. Tetapi kebohongan belum tentu memuat fabrikasi fakta. Bohong bisa dilakukan dengan merujuk fakta empiris yang sebenarnya tidak ada sama sekali, khususnya dalam pengertian kejadian yang telah terjadi. Titik tumpu utama dari suatu kebohongan adalah tercerabutnya ucapan dari kebenaran empiris. Sementara *bullshit*, titik tumpu utamanya terletak pada ketidak-pedulian si penutur tentang ada atau tidaknya kebenaran (Frankfurt, 2005). Si penutur hanya peduli pada ucapan yang mungkin efektif untuk menaklukkan audiens di saat tertentu dengan efek yang diinginkannya. Berbeda dengan bohong yang bertumpu pada bukti empiris, *bullshit* lebih bertumpu pada ‘maksud’ si penutur ketika berada pada satu momen verbal tertentu.

Misalnya, Senin, 2 Agustus 2021, Jokowi pernah mengatakan, “masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik.” Pernyataan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Mantan Wapres Jokowi, Jusuf Kalla, misalnya mengatakan, “tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya menyampaikan kritik tanpa dipanggil polisi? Seperti yang disampaikan Pak Kwik (Kian Gie), dan sebagainya.” Hal yang perlu digarisbawahi dari pernyataan Jokowi adalah, pertama, pernyataan itu diucapkan dalam konteks makro di mana indeks demokrasi sedang menurun dan beberapa aparatus buzzer dan UU ITE telah berada di balik serangkaian kasus pembungkaman kebebasan berpendapat oleh sipil maupun aktifis, khususnya. Dan kedua, dalam konteks mikro, ucapan Jokowi merupakan bagian dari kata sambutannya di acara Laporan Akhir Tahun Ombudsman RI (Wibowo, 2021).

Maksud sebuah tuturan tidak pernah lepas dari pengaruh konteks (Gracia, 1995). Pilihannya adalah, apakah Jokowi sengaja memberikan intensi terbatas pada konteks mikro semata? Atau ada unsur luput dalam mempertimbangkan konteks yang lebih besar?

Modus koherensi pada dasarnya adalah sebuah ketidak-disiplinan dalam silogisme secara sengaja. Ketidak-disiplinan pada praktik silogisme biasanya terjadi dalam rangka komunikasi persuasif. Seseorang dapat memulai ucapan dengan premis spesifik, mengembangkannya menjadi premis spesifik lain yang berbeda, kemudian menyimpulkannya dalam bentuk premis general.

Modus koherensi juga biasanya muncul dalam bentuk pembenturan dalam suatu praktik metaforis yang melibatkan dua lokus yang berbeda. Misalnya, ada seorang agamawan yang mengatakan bahwa masa kini tidak berbeda dengan masa Nabi Musa dulu. Ia menunjuk pada persamaan adanya penggunaan koersi terhadap pendakwah oleh si penguasa. Sekilas, ucapannya masuk akal dan koheren, tetapi dalam ucapan itu tidak dijelaskan perbedaan antara masyarakat teokrasi dan masyarakat demokrasi. Bagi Fir’aun, kepercayaan baru sama artinya dengan delegitimasi kuasa. Fir’aun, sebagai elit Feodal, sekaligus merangkap Holy Beings, tidak mengenal *exercise of power* yang membolehkan siapapun menjadi pemimpin sebagai kehendak rakyat. Dengan kata lain, ada struktur sosial dan imajinasi politik yang luput disertakan dalam metafora itu.

Modus ini berpusar pada permainan kebenaran pragmatik sebagai pondasi utama. Ada tiga teknik modus praktik yang umumnya ditemukan. Pertama demagogi, yakni menjadi orang tengah dengan maksud membenturkan dua kelompok yang berbeda.

Kedua, *gaslighting*, atau teknik komunikasi yang memanipulasi kenyataan dengan tujuan memunculkan keraguan personal dalam diri si lawan bicara. Beberapa minggu setelah demonstrasi penolakan Omnibuslaw di bulan September 2020 silam, Jokowi memberikan pernyataan resmi bahwa demonstrasi itu disebabkan oleh misinformasi mengenai substansi rancangan Undang-Undang. Padahal, beberapa bulan sebelum demonstrasi itu terjadi, ada setidaknya sekitar 15 artikel ilmiah tentang dampak negatif soal Omnibuslaw terbit di *The Conversation Indonesia*. Di lain sisi, para pakar dan tokoh masyarakat juga telah melayangkan keberatannya atas Omnibuslaw. Pernyataan resmi itu merupakan *gaslighting* secara terbuka (Idris, 2020).

Ketiga, personalisasi kepercayaan. Teknik ini merupakan penggunaan pengalaman pribadi sebagai bahan tanding kenyataan hasil generalisasi sains. Demografer Aris Ananta pernah menceritakan (Ananta 2006), buku *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape* pernah dikritik oleh seorang sarjana. Buku ini menghasilkan angka 1,5% atau 3 juta penduduk etnis di Indonesia pada tahun 2000.

Sarjana tadi mengatakah bahwa angka itu terlalu kecil, karena menurutnya, ia sering melihat orang Cina. (Ananta 2006) menyanggah bahwa angka itu memang kecil bagi luas wilayah Indonesia secara keseluruhan, beserta perbedaan persebaran penduduk etnis Cina. Sarjana tadi percaya bahwa statistik itu bohong dan seharusnya angka penduduk Cina lebih besar dari itu. Setelah ditanya di mana sarjana itu tinggal, si sarjana menjawab bahwa ia tinggal di kawasan Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara—sebuah distrik yang banyak dihuni oleh etnis Cina.

Seputuh tahun kemudian, yakni tahun 2016, tuduhan kebohongan terhadap statistik ketika yang diperlihatkan berbeda dengan pengalaman personal, terjadi lagi. Kasus ini terjadi dalam dialog antara pendukung Trump, Newt Gingrich, dan seorang reporter CNN, Alison Camerotta (McIntyre, 2018). Isunya tentang keamanan masyarakat dan kriminal. Ketika Camerotta mengutip data FBI bahwa angka kriminalitas menurun, Gingrich mengatakah bahwa “tapi orang-orang merasa tidak aman, dan angka kriminal naik. Saya akan membiarkan anda bersama para statistik, dan saya akan tetap bersama masyarakat.”

Pembenturan antara pengalaman pribadi dan kenyataan ilmiah kadang memang sepenuhnya dapat berasal dari literasi seseorang dalam memprioritaskan jenis kebenaran. Tapi di lain sisi, pembenturan tersebut dapat sengaja dimunculkan sebagai modus delegitimasi kebenaran tertentu untuk tujuan politik. Sains memang mengenal istilah anomali. Pihak yang berkepentingan dengan pengalaman pribadi kadang membungkus pengalamannya sebagai anomali agar mendapat pengecualian dari verifikasi sains namun tetap dianggap valid. Tetapi, sains memiliki persyaratan tersendiri tentang ciri-ciri anomali yang sering kali tidak dipahami oleh penentangannya.

Sains tidak lepas dari praktik manipulatif. Bogus research, atau riset palsu, adalah riset yang meskipun desain beserta operasinya dijalankan sesuai dengan kaidah ilmiah, tetapi sistematika beserta elemen di dalamnya telah digariskan untuk menghasilkan kesimpulan tertentu. Bogus research banyak dilakukan oleh perusahaan, umumnya perusahaan minyak dan tembakau, yang sedang terancam oleh kebijakan tertentu sehingga mendorong mereka untuk menyajikan kebenaran tandingan agar dapat menegosiasi atau bahkan membatalkan kebijakan tersebut (Lee McIntyre, 2018).

Modus manipulasi berbasis sains juga dapat berupa cherry picking atau pilah-pilih, sumber atau argumen yang sesuai dengan kepentingan atau ideologinya. Cherry Picking mendorong penggunaanya untuk menyeleksi tulisan-tulisan ilmiah dengan satu perspektif atau hasil tertentu, dan memilih pandangan-pandangan yang menguatkan pihaknya atau menjatuhkan lawannya tanpa disertai dialektika yang proporsional antara keduanya, dan tanpa pengujian ulang atas sumber-sumber yang dikutipnya. Cherry picking banyak ditemukan dalam kontestasi partisan, baik dalam nuansa agama, golongan, politik ataupun kombinasi dari semuanya, untuk memperkuat diri dan melemahkan pihak lawan.

Dalam kontestasi kelompok agama misalnya, mimbar ceramah kadang diisi oleh pemuka agama yang mampu menggunakan bahasa akademik untuk meyakinkan pengikutnya bahwa basis moral atau basis kepercayaan yang diyakininya tidak kalah superior dibanding argumentasi-argumentasi ilmiah yang pada derajat tertentu dinilai mengancam keberlangsungan basis moral dan kepercayaan tadi. Posisi sosiologis pemuka agama tadi menentukan praktik diskursif yang dilakukan. Penggunaan bahasa akademik oleh pemuka non-akademik digunakan untuk mendapat legitimasi dan mendefinisikan kompetensi diri yang sejajar dengan akademisi yang sebenarnya, meskipun di sana-sini dapat ditelusuri kekeliruan yang substantif.

Dalam kontestasi politik, cherry picking banyak dilakukan di tataran superioritas ideologi dan di ranah superioritas program yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Kebutuhan validasi dan invalidasi tersebut membuka peluang bagi sebagian akademisi atau intelektual untuk bergabung dalam tim kampanye atau juru bicara.

Praktik manipulasi lain di dalam sains adalah scientific fraud, atau kecurangan saintifik, yakni upaya sejangaja dan sistematis dalam memalsukan data. Scientific fraud sering kali dilakukan ketika muncul ketidak-seimbangan antara kompetensi diri dan tuntutan yang ada. scientific fraud juga kadang diarahkan untuk memojokkan liyan.

Ranah agama adalah ranah yang paling sensitif di anatara ranah lainnya, khususnya dalam konteks masyarakat muslim. Salah satu penyebabnya adalah sifat agama yang polisemik, yakni dapat tafsirkan dengan berbagai cara dan kesimpulan. Tetapi dalam kaitannya dengan post-truth, agama dapat berperan melalui dua ranah, yakni tafsir teks dan prinsip hukum kehidupan.

Tafsir teks adalah salah satu kontributor utama pada post-truth yang bernuansa keagamaan. Meskipun teks agama bersifat polisemik, tetapi praktik tafsir teks suci sering kali dioperasikan oleh individu dengan kemampuan bahasa, logika, filsafat, dan wawasan yang terbatas, atau terlalu komitmen terhadap ideologi tertentu. Implikasinya, diversitas perbendaharaan kata dalam bahasa arab, terjerembab pada translasi atau pemaknaan yang tidak akurat atau bahkan meleset sama sekali. Dalam bahasa arab misalnya, kata 'apa' memiliki tiga perbendaharaan kata dengan konteks yang berbeda, yakni ma, fa, dan a. Tiga variasi itu ada yang diperuntukkan bagi konteks logika, retorik dan sastra. Penerapannya tentu berpengaruh terhadap pemaknaan kalimat keseluruhannya.

Akan tetapi, kesadaran tentang bahasa adalah salah satu yang tidak begitu populer, kecuali di ranah universitas. Implikasinya, praktik diskursif agama banyak berpaut pada standar moral dan etika populer dibanding penelaahan secara disiplin, yang selanjutnya melahirkan distorsi yang tidak sadari. Masalah lebih jauh kemudian muncul ketika kepentingan politik ikut memengaruhi semangat beragama, hingga pada gilirannya agama menjadi penyedia energi bagi post-truth.

Selain persoalan tafsir, persoalan otoritas atau prinsip kuasa kehidupan juga memainkan peran terhadap bagaimana seharusnya seseorang atau umat menavigasi dirinya dalam kehidupan dunia yang tidak pasti. Ilmu sosial akan memandang ketidakpastian hidup sebagai masalah struktural hasil jejal kekuatan sosial, ekonomi dan politik, yang bisa dipahami, dan bisa dipecahkan lewat serangkaian pemecahan materil. Dengan kata lain, ilmu sosial lebih melihatnya sebagai fenomena profan.

Sementara, sebagian kalangan teosentris fanatik meyakini kalau kekuasaan Tuhan adalah segalanya. Kemiskinan, nasib buruk, dan masalah sosial lain dipahami sebagai hukuman Tuhan atas dosa tertentu. begitu pun sebaliknya: nasib baik adalah berkah dari perbuatan baik. Sebagian dari mereka juga meyakini bahwa masa-masa sulit, baik dalam arti ekonomi, diskriminasi, atau apapun, dapat teratasi secara Ajaib oleh kehendak Tuhan bila tetap beriman dan setia padanya.

Tetapi dalam situasi mendesak seperti munculnya pandemic covid-19, ataupun situasi lain, di mana kecemasan komunal semakin mengkristal dan keajaiban tak kunjung turun meski telah mendedikasikan diri sepenuhnya, bentuk nalar tadi sering menegasi kebenaran saintifik yang umumnya bersifat profan. Kasus anti-vaksin, dan anggapan bahwa pembatasan sosial merupakan upaya menjauhkan umat Islam dari masjid, adalah beberapa fenomena yang identik dengan keyakinan kelompok sayap kanan terhadap masalah otoritas kekuasaan di dunia: apakah kuasa kebenaran materil atau kebenaran ilahiyah. Oleh karena itu, pada beberapa kasus tertentu, mempercayai sesuatu yang tidak terlihat, atau bahkan yang secara saintifik terbukti membahayakan, dapat dikategori sebagai tindakan beriman yang memiliki nilai tebusan di akhirat.

Dalam praktiknya yang lebih luas, etika kelompok dan cita-cita komunal merupakan lokus lain yang digunakan sebagai modus modus manipulasi post-truth. Etika tidak hanya mengatur tentang bagaimana seseorang selayaknya bertindak, bersikap dan bergelagat. Etika juga merupakan sebuah identitas keanggotaan dari sebuah kelompok tertentu. Seseorang dapat diidentifikasi afiliasinya berdasarkan serangkaian sikap yang dia tampilkan, Ketika ada seseorang dengan identitas religius yang sama tetapi memiliki sikap yang berbeda, khususnya perihal masalah sensitif dan mendasar seperti konsep politik Islam, maka ia dapat dieksklusi oleh kelompoknya.

Dengan kata lain, ada koersi sosial tak tertulis yang mendorong kewajiban memeluk bentuk etika tertentu sebagai bentuk rekognisi keanggotaan dirinya. Dari pihak individu, pengakuan keanggotaan ini mendorong perasaan untuk tetap terikat dengan kelompoknya. Pada dinamika hubungan itu, muncul sebuah

konstruk emosionologi tertentu yang membedakan antara satu anggota kelompok dengan anggota kelompok lain. Konstruk emosionologi, dan perasaan keanggotaan itu yang kemudian dapat mempersuasi individu untuk memercayai klaim keagamaan yang rapuh (mislead).

Pada derajat tertentu, sebagian dari apa yang telah dijelaskan dalam modus agama adalah juga bagian dari modus norma-ideologi. Modus itu merupakan bentuk exercise of power dalam payung post-truth Fullerial, yakni didahulukannya kebenaran normative daripada kebenaran saintifik, meskipun realitas masalah yang dihadapi membutuhkan pendekatan berbasis kebenaran saintifik.

Namun, di antara tiga jenis kebenaran utam, yakni kebenaran saintifik, kebenaran bahasa, dan kebenaran normative-ideologis, kebenaran normatif-ideologis adalah kebenaran yang paling setia terhadap kelompok atau individu yang menjadi tuannya. Sedangkan kebenaran saintifik adalah yang paling impersonal dan semata berpaut pada kenyataan semata. Di antara keduanya, kebenaran bahasa adalah yang paling lentur: bisa sangat personal dan setia pada kelompok tertentu, tetapi juga bisa sangat impersonal.

Dalam praktik modus norma-ideologis, variabel utama dapat berupa paham agama, paham politik, ataupun paham ideologi tertentu yang berlaku dalam sebuah masyarakat heterogen. Kasus meme King of Lip Service yang dibuat oleh BEM UI adalah salah satu praktik diskursif yang memuat teknik post-truth berbasis norma-ideologis. Meme itu memuat foto Presiden Jokowi dengan stiker mahkota, dan beberapa informasi tentang ketidak-sesuaian antara ucapan dan tindakan politik Jokowi, khususnya menyangkut isu Omnibuslaw, kebebasan berpendapat, dan oligarki industri ekstraktif.

Tidak lama setelah unggahan itu viral, BEM UI mendapat teguran etik dari pihak rektorat. Presiden Jokowi kemudian memberikan respon resmi, yang mengatakan bahwa kritik adalah baik selama menggunakan etika dan sopan santun sebagai ciri bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari kasus ini.

Pertama, kritik dan kebenaran yang telah terabaikan sejaklaman, dapat mewujudkan dalam bentuk yang paling lantang atau kontroversial agar mendapatkan perhatian dan atensi. Apa yang dilakukan BEM UI merupakan kebalikan dari tradisi komunikasi elit politik Indonesia, di mana kehalusan berbahasa merupakan praktik distorsi kenyataan politik yang sebenarnya banal. Sebagaimana yang diungkapkan Heryanto, bahasa Indonesia lebih merepresentasikan kenyataan politik dibanding kenyataan yang sebenarnya.

Kedua, ada ketidak-imbangan diskursif antara BEM UI dan respon presiden Jokowi. BEM UI menyajikan kebenaran saintifik dengan kemasan kontroversial. Sementara presiden Jokowi hanya menggaris bawahi masalah etika, dan tidak sama sekali menyentuh isu yang diangkat oleh BEM UI. Kebenaran saintifik yang diangkat BEM UI mengalami pelenyapan. Dalam praktik diskursif, sesuatu dianggap tidak ada ketika tidak dibantah atau bahkan tidak disebut sama sekali. Membantah atau bahkan menyebut isu yang diangkat oleh BEM UI sama halnya dengan mengakui eksistensi isu tersebut, yang sama artinya dengan mau menerima konsekuensi politik yang timbul dari debat yang dihasilkannya.

Model Literasi Post-Truth

Penanggulangan post-truth setidaknya perlu mempertimbangkan struktur sosial, agensi politik, corak ideologis, dan sejarah praktik ideologi yang ada dalam sebuah masyarakat. Pertimbangan tersebut adalah bagian dari pendekatan struktural yang mengasumsikan bahwa perilaku individu dan sebuah fenomena sosial tidak lepas dari jejaring aktor dan relasi kuasa yang mengitarinya. Berbeda dengan pendekatan struktural, pendekatan fungsionalis melihat bahwa jika ada masalah, baik di tataran individu ataupun di tataran komunal, maka merupakan sebab dari individu ataupun komunitas tersebut. Asumsi utama pendekatan fungsional adalah, bila ada masalah yang dialami individu atau komunitas, maka individu atau kelompok tersebut perlu diberikan pembinaan. Pada premis yang demikian, pendekatan fungsional cenderung mengabaikan struktur sosial politik dan relasi kuasa yang mengitari individu atau kelompok tersebut.

Dalam konteks Indonesia, ada empat variabel yang perlu dipertimbangkan untuk menanggulangi post-truth. Pertama, struktur sosial. Kedua, kehendak politik. Ketiga, sejarah praktik ideologi. Dan keempat, Islam. Struktur sosial adalah tentang relasi antar masyarakat dan pemimpinnya beserta produksi pengetahuan

di antara mereka. Kehendak politik adalah maksud, niatan, rencana, dan tradisi politik elit-elit di Indonesia terkait penguasaan wacana dan kesadaran masyarakat.

Sejarah praktik ideologi adalah pertimbangan tentang bagaimana Pancasila, nasionalisme dan semangat kebangsaan dipraktikkan dalam satu momen sejarah politik tertentu, khususnya pada penggunaan-penggunaan yang bersifat distortif. Sehingga, kesadaran ideologi berbangsa tidak terbatas pada kesadaran naif, melainkan berupa kesadaran kritis. Islam dalam pertimbangan ini adalah soal bagaimana pengaruh tafsir teks, gerakan pemikiran, dan hubungan sosiologis antar kelompok memengaruhi logika masyarakat dalam menyikapi suatu isu atau fenomena tertentu. Dengan menyematkan Islam sebagai pertimbangan, selain karena jumlahnya mayoritas, maka unsur politisasi agama dapat dipisahkan dari ketulusan agama yang sebenarnya.

Berdasarkan ulasan dimensi dan modus manipulasi post-truth, dan berdasarkan pertimbangan di atas, maka, setidaknya literasi post-truth dapat dibagi menjadi empat bagian yang dapat saling melengkapi satu sama lain.

Pertama, literasi tekstual dan kebahasaan. Literasi tekstual dan kebahasaan mengajak peserta didik untuk mengenali elemen pembentuk sebuah teks (tanda, makna, maksud, dan susunan). Nuansa pembelajaran dapat berupa latihan menggunakan piranti semantik dan hermeneutis. Tujuannya agar sensitivitas dalam mempertimbangkan, menafsirkan dan menelaah suatu teks, informasi dan pesan, baik berupa verbal, tertulis ataupun multimedia dapat terbagun dengan memadai.

Kompetensi ini diperlukan untuk: memitigasi kondisi post-truth akibat puitika multimedia di ruang digital; membangun skeptisisme di tengah banjir *persuasive-talker*; menyadari tentang tanggung jawab berbahasa beserta penyelewengannya. Latihan dapat berupa kegiatan pembedahan sebuah teks, baik visual, verbal ataupun kombinasinya, secara bersama-sama. Peserta diajak untuk mengenali motif ideologi, dinamika konteks, dan kuasa penulis teks dalam teks yang dibedahnya.

Kedua, literasi logika dan sains. Peserta didik diajak untuk mengenali beragam jenis-jenis logika, baik logika klasik berbentuk silogisme hingga jenis-jenis nalar yang ada dalam sebuah agama. Muatannya setidaknya terdiri tiga hal: pertama, berupa pengantar minimum yang minimalnya dapat membuat peserta didik mengenali jenis logika dan nalar mana yang berlaku dalam sebuah informasi; kedua, peserta diajak untuk membedah misinformasi, disinformasi, pelintiran, dan modus-modus post-truth berdasarkan peta yang telah dipaparkan di atas; ketiga, peserta diajak untuk mengenali bagaimana logika keagamaan dapat mendahului logika saintifik, dan beserta bagaimana ranah itu dipolitisasi. Pada kegiatan yang ketiga ini, agamawan, pakar bahasa dan logika dilibatkan. Selain untuk tujuan pengembangan model nalar antar tradisi, juga untuk tujuan pendisiplinan dan perapihan tata berpikir di ruang publik berdasarkan porsi yang memadai dan bisa dipertanggung jawabkan.

Ketiga, literasi politik dan praktik ideologi. Penggunaan teks dan praktik berlogika dan berbahasa ditentukan oleh kehendak politik dan ideologi. Literasi politik dan ideologi di sini diartikan sebagai literasi tentang teknik kekuasaan dalam mendistorsi konstruk berpikir dan kesadaran masyarakat. Muatannya mencakup soal pembelajaran tentang sejarah manipulasi kekuasaan (sebagaimana yang terjadi dalam kasus diorama monas) dari yang klasik hingga kontemporer di Indonesia. Harapannya, dari pembelajaran sejarah itu, peserta didik dapat memiliki kepekaan dalam mengidentifikasi dan mengungkap praktik distorsi tertentu.

Dimensi ideologi juga menjadi sorotan dalam literasi ini. Peserta didik diajak untuk mengenali bagaimana ideologi dapat menciptakan norma; bagaimana norma itu dikedepankan; dan kapan norma mengalami banalitas (sebagaimana dalam kasus Terawan dan Marc Lipsitch). Di lain sisi, literasi ideologi juga memberikan kesadaran pada individu ataupun kelompok tentang posisi kognitifnya dalam konstelasi perdebatan suatu isu ataupun hubungan sosial antar kelompok. Harapannya, terjadi kelenturan dalam bersikap; tajam dan ketat terhadap diri sendiri; dan adil dalam memberikan prejudis kepada orang atau kelompok lain.

Keempat, pengenalan ekologi media. Literasi media umumnya menekankan soal pemisahan hitam-putih antara fakta dan hoaks. Ekologi media, masih sedikit mendapat perhatian untuk diajarkan sedini mungkin. Padahal ekologi digital telah mengambil alih kehidupan sehari-hari. Pengenalan ekologi media mencakup pengenalan tentang lansekap, entitas, dan aktor yang ada di dunia digital beserta perannya masing-masing. Selain mencakup uraian deskriptif dan definitif, pengenalan juga disajikan secara spekulatif.

Artinya, peserta didik diajak untuk melihat potensi sosial politik yang mungkin ditimbulkan dari hubungan dan dinamika antar entitas di dunia digital.

Bagaimana algoritma menciptakan bias; bias-bias apa saja yang mungkin terjadi; dan implikasi apa dari bias itu, adalah salah satu perhatian yang diberikan, di samping ulasan soal bagaimana algoritma ditanggapi; bagaimana algoritma menciptakan kenikmatan ideologi pada individu dan kelompok; dan bagaimana distorsi kebenaran ditunjang oleh algoritma.

D. Kesimpulan

Empat literasi di atas dapat diterapkan secara sektoral. Sekolah misalnya, dapat menerapkan literasi nomor satu, dua dan empat. Perguruan tinggi, atau komunitas masyarakat dapat menjadi pelengkap sekaligus pionir dalam memberikan literasi politik dan ideologi. Institusi keagamaan, seperti masjid kompleks, atau TPA, dapat mengambil salah satu sub-bagian dari literasi logika dan sains untuk memitigasi perkembangan konservatisme atau fanatisme tingkat lanjut.

Daftar Pustaka

- Adam, Asvi Warman. 2006. *Sejarah, Nasionalisme Dan Kekuasaan*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Ananta, Aris. 2006. *Mudharat Dan Manfaat Statistik Ekonomi Sosial*. Singapura: Equinox Publishing.
- Ball, James. 2017. *Post-Truth: How Bullshit Conquered the World*. London: Biteback Publishing.
- Baron, Ilan Zvi. 2018. *How to Save Politics in the Post-Truth Era*. Manchester: Manchester University Press.
- Barzilai, S., and C. A. Chinn. 2020. "A Review of Educational Responses to the 'Post-Truth' Condition: Four Lenses on 'Post-Truth' Problems." *Educational Psychologist* 55(3):107–19.
- Boseley, Sarah. n.d. *Mbeki AIDS Denial 'Caused 300,000 Deaths*. The Guardian.
- Budiman, Arif. 1986. *Sistem Perekonomian Pancasila Dan Ideologi Ilmu Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Bunz, M. 2014. "The Silent Revolution: How Digitalization Transforms Knowledge, Work, Journalism and Politics without Making Too Much Noise." In *The Silent Revolution: How Digitalization Transforms Knowledge, Work, Journalism and Politics without Making Too Much Noise*.
- Cahya, G. H. 2020. "'It's Meant to Help: Harvard Professor Responds After Government Dismisses Study on Undetected Coronavirus.'" *The Jakarta Post*.
- Farid, H. 2006. *Masalah Kelas Dalam Ilmu Sosial Indonesia*. Singapura: Equinox Publishing.
- Floridi, L. 2014. *The Fourth Revolution*. New York: Oxford University Press.
- Kalpokas, I. n.d. "A Political Theory of Post-Truth." In *A Political Theory of Post-Truth*.
- Krahenbuhl, K. S. 2021. "The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Teaching for the Pursuit of Truth in a Post-Truth World Teaching for the Pursuit of Truth in a Post-Truth World." *The Clearing House* 94(1):31–37.
- Krasmann, S. 2020. "The Logic of the Surface: On the Epistemology of Algorithms in Times of Big Data." *Information Communication and Society* 23(14):2096–2109.
- McComiskey, Bruce. 2017. *Post-Truth Rhetorics and Compositions*. Utah: Utah State University Press.
- Rakhmani, I., and M. S. Saraswati. 2021. "Authoritarian Populism in Indonesia: The Role of the Political Campaign Industry in Engineering Consent and Coercion." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.

- Ward, K. 2018. "Social Networks, the 2016 US Presidential Election, and Kantian Ethics: Applying the Categorical Imperative to Cambridge Analytica's Behavioral Microtargeting." *Journal of Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality* 33(3):133–148.
- Woolley, S. C., and P. N. Howard. 2019. *Computational Propaganda; Political Parties, Politicians, and Politik Manipulation on Social Media*. Oxford: Oxford University Press.
- Zuboff, S. 2019. "Surveillance Capitalism and the Challenge of Collective Action." *New Labor Forum* 28(1):10–29.